

RINGKASAN EKSEKUTIF LAKIP PPPPTK PENJAS DAN BK TAHUN 2016

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun anggaran 2016 melaporkan capaian kinerja hasil (*outcome*) dan keluaran (*output*) program yang telah berjalan. Laporan ini dimulai pada periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2016 sesuai dengan kebijakan utama dalam Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang terdiri dari kegiatan pengembangan sumber daya manusia, penjaminan mutu pendidikan, pengembangan sarana dan prasarana, dan kegiatan rutin untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas PPPPTK Pendidikan Jasmani dan Bimbingan Konseling. PPPPTK Pendidikan Jasmani dan Bimbingan Konseling juga mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan yang telah dilakukan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999.

Sesuai dengan Permendiknas No.44 Tahun 2010, PPPPTK mempunyai 3 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang digunakan sebagai ukuran dalam pencapaian sasaran strategis PPPPTK Penjas dan BK. Anggaran PPPPTK Penjas dan BK tahun 2016 sebesar Rp. 148.803.363.000,- dan terserap sebesar Rp. 81.110.435.283,- atau 54.51%. Terdapat dana Self Blocking sebesar Rp. 57.643.437.000,-. Secara umum sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan tahun anggaran 2016 tercapai dengan baik dengan daya serap fisik sebesar 60.84%.

Dengan demikian, *tugas pokok* PPPPTK Pendidikan Jasmani dan Bimbingan Konseling *sebagai lembaga diklat dan pengembang pendidikan, khususnya Pendidikan Jasmani dan Bimbingan Konseling tahun anggaran 2016 telah terwujud*. Terlaksananya beberapa program dan kegiatan tahun 2016 menunjukkan kontribusi nyata dalam pengembangan Sekolah maupun peningkatan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan khususnya bidang Pendidikan Jasmani dan Bimbingan Konseling. Prosentase capaian setiap output, sebagai berikut;

1. Output Guru yang ditingkatkan kompetensinya menurut bidang
Penjaskes dan BK
Dari pagu anggaran sebesar Rp. 51.776.108.000,- telah terealisasi
sebesar Rp. 44.562.873.143,- dengan prosentase sebesar 85.99%.
Realisasi fisik sebesar 87.60%
2. Output Kepala Sekolah yang ditingkatkan kompetensinya
Dari pagu anggaran sebesar Rp. 9.971.986.000,- telah terealisasi
sebesar Rp. 8.750.881.437,- dengan prosentase sebesar 87.75%.
Realisasi fisik sebesar 90.25%
3. Output Pengawas yang ditingkatkan kompetensinya
Dari pagu anggaran sebesar Rp. 908.990.000,- telah terealisasi sebesar
Rp. 569.904.766,- dengan prosentase sebesar 62.70%. Realisasi fisik
sebesar 65.25%
4. Output Model pemberdayaan Sekolah dan Pengembangan Inovasi
Pembelajaran
Dari pagu anggaran sebesar Rp. 81.600.000,- telah terealisasi sebesar
Rp. 79.830.557,- dengan prosentase sebesar 97.83%. Realisasi fisik
sebesar 100%
5. Output Dokumen Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan
Ketatausahaan
Dari pagu anggaran sebesar Rp. 1.066.166.000,- telah terealisasi
sebesar Rp. 955.893.649,- dengan prosentase sebesar 89.66%.
Realisasi fisik sebesar 100%
6. Output Layanan Perkantoran
Dari pagu anggaran sebesar Rp. 16.254.676.000,- telah terealisasi
sebesar Rp. 15.728.787.745,- dengan prosentase sebesar 96.76%.
Realisasi fisik sebesar 100%
7. Output Kendaraan Bermotor
Dari pagu anggaran sebesar Rp. 599.780.000,- telah terealisasi sebesar
Rp. 581.810.000,- dengan prosentase sebesar 97.00%. Realisasi fisik
sebesar 100%
8. Output Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

Dari pagu anggaran sebesar Rp. 456.430.000,- telah terealisasi sebesar Rp. 443.096.886 dengan prosentase 97.08%. Realisasi fisik sebesar 100%

9. Output Gedung/Bangunan

Dari pagu anggaran sebesar Rp. 10.044.200.000,- telah terealisasi sebesar Rp. 9.437.357.100 dengan prosentase sebesar 93.96%.
Realisasi fisik sebesar 100%

LAKIP disusun sebagai media pertanggungjawaban yang berisi informasi tentang kinerja instansi pemerintah dan manfaatnya, antara lain:

- a. Mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum Pemerintah (*good governance*) yang didasarkan atas undang - undang yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
- b. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat menjalankan tugas-tugas umum secara efisien, efektif, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.
- c. Menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah.
- d. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.
- e. LAKIP juga digunakan sebagai bahan masukan bagi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam menentukan kebijakan selanjutnya.

Selama pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2016, PPPPTK Pendidikan Jasmani dan Bimbingan Konseling menghadapi beberapa kendala dan permasalahan sehingga mempengaruhi capaian target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Kendala dan permasalahan tersebut meliputi:

- a. Adanya akumulasi biaya perjalanan dan bahan bagi peserta yang tidak hadir
- b. Data sasaran peserta kegiatan Guru Pembelajar yang dipetakan berdasarkan modul yang dipelajari sehingga menyebabkan jumlah peserta dalam suatu Kabupaten atau Kota tidak sesuai dengan kuota yang telah ditentukan